

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

YESI SUSANTI

NIM. 15346

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

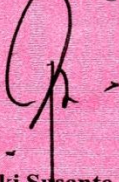
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KOTA PARIAMAN**

Nama : Yesi Susanti
NIM : 15346
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 23 Januari 2013

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP.19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KOTA PARIAMAN**

Nama : Yesi Susanti
NIM : 15346
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

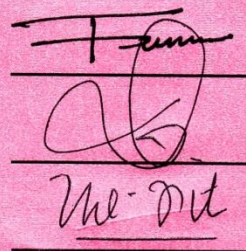
Padang, 17 Januari 2013

Tim Penguji,

Ketua : Fefri Indra Arza,SE,M.Sc,Ak

Anggota : Deviani, SE,M.Si, Ak

Anggota : Nelvirita,SE,M.Si,Ak



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is in black ink and appears to be 'Fefri'. The middle signature is in black ink and is more stylized. The bottom signature is in black ink and appears to be 'Nelvirita'.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi Susanti
Thn. Masuk/NIM : 2009/15345
Tempat/Tgl. Lahir : Aur Malintang, 17 Februari 1991
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Ngurah Rai 3 No 3 Air Tawar Timur
Judul Tugas Akhir : Analisis Perkembangan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tatapenulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2013



Yang Menyatakan,

Yesi Susanti
NIM. 15346

ABSTRAK

Yesi Susanti : **Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pembimbing : **Fefri Indra Arza. SE,M.Sc.Ak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kota Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pariaman dan data yang digunakan adalah data keuangan APBD kota Pariaman pada tahun anggaran 2009/2011.

Penelitian dilakukan dalam bentuk observasi dan penulis mengumpulkan data langsung dari dinas yang terkait. Dalam menganalisis keuangan penulis menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, dan Analisis pendapatan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan melihat hasil analisis diatas perkembangan keuangan di kota Pariaman di sektor keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang- peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi yaitu dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi DIII Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Dan tidak lupa salawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam berpengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kota Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
2. Nelvirita, SE, M.Si,Ak, selaku anggota pelaksana Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas negeri Padang
3. Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

4. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
5. Orang tua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan alasan yang setimpal atas semua kebaikan yang diberikan oleh semua pihak dan semoga skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmiah yang berguna bagi semua. Amiin.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. OTONOMI DAERAH	6
1. Pengertian Otonomi Daerah	6
2. Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah.....	7
B. Keuangan Daerah	10
1. Pengertian Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	10
2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	11
3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	13
C. Kemampuan Keuangan Daerah	14
D. Analisis Kemampuan keuangan Daerah	16
1. Analisis Pendapatan.....	17
2. Analisis Varians.....	18
3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan	19
4. Menghitung Rasio Keuangan daerah.....	20
a. Rasio Derajat Desentralisasi	20
b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	21
c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
d. Rasio Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan ..	22
e. Rasio Efisiensi dan Efektifitas Pajak.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26

A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir	26
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C.	Rancangan Penelitian	26
1.	Jenis Penelitian.....	26
2.	Jenis dan Sumber Data	27
3.	Prosedur Penelitian.....	27
4.	Objek Penelitian	28
D.	Teknik dan Analisis Data.....	28
E.	Analisis Data.....	28
BAB IV	PEMBAHASAN.....	30
A.	Profil DPPKA.....	30
1.	Sejarah Singkat.....	30
2.	Keadaan Geografis	30
3.	Visi, Misi, dan Moto DPPKA	31
4.	Bidang Kegiatan Yang Terkait Dengan Objek Penelitian	33
B.	Pembahasan	36
1.	Analisis Pertumbuhan Pendapatan	37
2.	Rasio Derajat Desentralisasi	39
3.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	40
4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	41
BAB V	PENUTUP	44
A.	Kesimpulan	44
B.	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PAD dan Pendapatan Transfer Pusat 2
Tabel 2	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah 25
Tabel 3	Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan 36
Tabel 4	Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi 37
Tabel 5	Rasio Pertumbuhan Pendapatan 38
Tabel 6	Kontribusi PAD terhadap TPD 39
Tabel 7	Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap TPD 40
Tabel 8	Rasio Kemandirian Kota Pariaman 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang

merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pendapatan daerah kota pariaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL I
PAD dan PENDAPATAN TRANSFER PUSAT
TA 2009-2011

Tahun Anggaran	PAD	Transfer Pusat
2009	Rp 12.263.180.927,45	Rp 260.711.074.337
2010	Rp 14.884.538.651,36	Rp 327.050.188.427
2011	Rp 12.920.749.000	322Rp.278.911.733

Sumber Data : DPPKA Kota Pariaman TA 2009-2011

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur

penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif hampir sama dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari 3 aspek ketersediaan prasarana dan sarana, pembiayaan dan personalia yang memadai untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan. kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Pariaman sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai

apakah Pemerintah daerah Kota Pariaman berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Untuk menilai rasio keuangan pada APBD Kota Pariaman, maka dalam lampiran ini akan dibahas tentang analisis rasio keuangan pada APBD Kota Pariaman. dan Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul : "Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Pariaman"

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kota Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kota Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD.
2. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun ini mengalami peningkatan dan penurunan disebabkan karena bertambah dan berkurangnya penerimaan pajak dan retribusi daerah
3. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi selama tiga tahun derajat desentralisasinya adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 4,02% hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan kota pariaman masih rendah dalam melaksanakan otonominya
4. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah kota pariaman terlihat bahwa pemerintah Kota Pariaman masih tergantung pada pemerinyah pusat
5. Kemandirian Kota Pariaman dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung

menurun, yaitu dari tahun anggaran 2009 4,70 menjadi 4,01 pada tahun anggaran 2011

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan pemerintah kota pariaman, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2009-2011 di Kota Pariaman saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.
4. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik /Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Erlangga
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang "*Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah*".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 "*tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*".
- Susanti Tasri, Evi. 2010. *Perekonomian Indonesia*. Padang : Bung Hatta University Press
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 *tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Rajawali Pers